



**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pemberangkatan PMI di Masa Pandemi)**

Ajeng Tiara B.R, Hermi Susiatiningsih, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Reopening of migrant workers' departures during the covid pandemic presents a contrast to the various protection policies that have been made before. This research aims to answer the research question: "why is the Indonesian government issuing a PMI departure policy during the Covid-19 pandemic?". To answer the formulation of the problem, the theory used is to combine rational actors with policy formulations. This research is explanatory using the content analysis method. This study uses the framework of rational actor by Graham Allison and Philip Zelikow as well as Jonathan Bendor and Thomas H. Hammond was used to find out how much influence the rational thinking style of a policymaker has when a policy is formed. The formation of a new policy by the government regarding the redeployment of PMI during a pandemic is considered a rational policy.

Keywords: *Indonesian migrant workers', rational actor, policy formulation, foreign exchange, economy*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak dampak negatif. Terutama dalam bidang perekonomian, dapat dikatakan sangat porak poranda akibat wabah ini. Banyak aktivitas yang terhambat berdampak pada terhambatnya perkembangan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya sangat merasakan dampak yang signifikan pada bidang ekonomi akibat pandemi Covid-19

Pemerintah melalui beberapa kementerian mengeluarkan model kebijakan inkremental. Kebijakan inkremental adalah sebuah bentuk pengambilan kebijakan melalui proses interaksi serta adaptasi dari berbagai aktor yang memiliki nilai berbeda, kepentingan berbeda, serta informasi yang berbeda (T. Hayes, 2020). Contoh kebijakan-kebijakan tambal sulam tersebut menghasilkan beberapa kebijakan seperti *Work From Home* diawal penyebaran virus, kemudian menerapkan PSBB utamanya bagi wilayah-wilayah zona merah, melakukan larangan beribadah di tempat umum dan

larangan mudik saat lebaran, kemudian melakukan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di tingkat daerah (detik.com, 2020).

Kebijakan inkremental ini juga terjadi pada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI). Sebelumnya memang telah dilakukan penghentian sementara untuk pengiriman pekerja migran. Penghentian ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 (Tristiawati, 2020). Akan tetapi cukup disayangkan ketika Menteri Ketenagakerjaan melayangkan Surat Keputusan baru, yakni Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Kurniawati, 2020).

Adanya kebijakan saling tumpang tindih yang berlaku di Indonesia ini juga menjadi banyak pertimbangan ketika Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut diberlakukan. Dapat dilihat dari sulitnya akses keluar masuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) ke dalam wilayah Indonesia, sesuai dengan Surat Edaran 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Kementerian Perhubungan, 2021). Selain itu baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Luar Negeri juga telah menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat bagi WNI maupun WNA yang hendak melakukan perjalanan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah aktor yang turut serta mengharapkan bahwa PMI ini dapat diberangkatkan untuk alasan-alasan tertentu

Tulisan ini ingin mengangkat permasalahan kebijakan inkremental ini, khususnya fokus mempertanyakan kepentingan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah atau justru oknum-oknum tertentu dibalik kebijakan pemberangkatan PMI atau pekerja migran di masa pandemic covid 19 dengan menggunakan kerangka berpikir teori *rational actor* dan formulasi dalam pengambilan kebijakan yang digagas oleh *Graham Allison and Philip Zelikow* dan *Jonathan Bendor and Thomas H. Hammond*.

PEMBAHASAN

Faktor Utama Pendukung Pemberangkatan PMI

Faktor pendukung yang menjadi alasan mengapa pemerintah pada akhirnya melakukan pemberangkatan kembali PMI saat pandemi ialah bersumber dari besarnya pendatan remitansi PMI dan juga berasal dari beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.

Para PMI merupakan penyumbang pendapatan terbesar kedua bagi Indonesia setelah minyak dan gas, remitansi yang dihasilkan jika dihitung secara keseluruhan dapat mencapai nilai 159,6 Triliun per tahun (Kompas.com, 2021b). Namun saat

pandemi menyerang jumlah remitanansi yang dihasilkan mengalami penurunan, sebelumnya di tahun 2019 PMI masih dapat menyumbang pemasukan sebesar US\$ 11,43 miliar dan menurun pada tahun 2020 yang hanya mampu menghasilkan US\$ 9,4 miliar (kontan.co.id, 2021).

Selama pandemi covid-19 Indonesia mengalami beberapa permasalahan yang perlu untuk diselesaikan, utamanya permasalahan yang menjadi faktor penghambat laju perekonomian di Indonesia pada saat pandemi. Dibawah ini merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia, yakni:

Pertama, pemerintah Indonesia dihadapkan pada kondisi laju pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan rendahnya daya beli maupun konsumsi pada putaran masyarakat, kemerosotan tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami resesi pada tahun 2020. Dilihat dari data yang ada, dimana pada kuartal kedua tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32% dan pada kuartal ketiga mengalami sedikit penurunan menjadi 3,49% (BBC News Indonesia, 2020).

Faktor lain yang membuat ekonomi mengalami kemerosotan ialah dengan diberlakukannya berbagai bentuk aturan pembatasan mobilitas dengan sangat ketat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Sebelumnya disebutkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2020 Indonesia mengalami jurang kontraksi yang cukup serius, sehingga mengakibatkan GDP rill hanya mencapai nilai Rp 2.590 triliun dibandingkan pada tahun 2019 yang mampu mencapai nilai Rp 2.735 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Pada tahun 2020 nilai investasi juga mengalami penurunan yakni sebesar 4,3 persen dibandingkan pada kuartal I yang nilainya masih mampu stabil di 8% seperti tahun sebelumnya (Jawa Pos, 2020).

Kedua, adanya kondisi ekonomi yang melemah menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah PHK meningkat sebanyak 72.983 orang di PHK dari pabrik maupun perusahaan tempat bekerja (Liputan 6, 2021).

Ketiga, permasalahan yang dihadapi ialah mengingat banyaknya PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan saat pandemi tentunya menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data yang tersaji angka pengangguran meningkat yang mulanya mampu ditekan 4,9% kini menjadi 7% atau dapat dikatakan terdapat 9,7 juta masyarakat berstatus pengangguran (Kompas.com, 2021a).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh pemerintah terkait dilema pemberangkatan kemabali PMI ialah berasal dari dorongan masyarakat itu sendiri. Bedasarkan hasil wawancara bersama B2PMI memberikan keterangan bahwa tingginya permintaan dari masyarakat untuk dapat di berangkatkan menjadi PMI. Masyarakat tersebut merupakan

orang yang terdampak dari PHK, sehingga mendaftarkan diri sebagai calon PMI dan berharap dapat melanjutkan hidup dengan menjadi seorang pekerja migran. Dengan memikirkan pula kondisi masyarakat yang membutuhkan penghasilan guna keberlangsungan hidup keluarga, sehingga menyita perhatian tersendiri dari pihak BP2MI.

Pemerintah Indonesia berfokus pada setidaknya 4 permasalahan yang sedang dihadapi diatas, terlebih pada upaya perbaikan perekonomian yang melemah. Upaya yang dilakukan tentunya dengan membuat beberapa kebijakan salah satunya terkait PMI. Sejalan dengan pemikiran Allison (1999), Bendor & H. Hammond (2014) dalam bukunya mengatakan bahwa para pelaku pembuatan kebijakan dituntut untuk dapat menentukan sebuah alternatif penyelesaian pada satu waktu tertentu. Waktu tertentu ini merujuk pada situasi dan kondisi yang sangat mendesak dan diperlukan untuk segera dirumuskan penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini pemerintah mengalami sebuah dilema, yang mana kondisi covid tidak mendukung untuk dilakukan pengiriman PMI pada sisi lain jumlah pengangguran meningkat yang menyebabkan keadaan ekonomi semakin memburuk.

Melihat jumlah remitansi yang dihasilkan PMI terbilang sangat besar dan telah menjadi peyumbang devisa terbesar bagi Indonesia sejak lama hingga para PMI mendapat julukan pahlawan devisa, kemungkinan terbesar yang dapat diambil ialah dengan memberangkatkan kembali para PMI. Kembali pada teori *rational actor* yang mengatakan tindakan pembuat kebijakan akan melihat peluang paling menguntungkan, disini remitansi yang tinggi merupakan peluang yang menguntungkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, dengan pemberangkatan kembali tentunya harapan besar di pihak pemerintah ialah bertambahnya jumlah remitansi yang masuk sehingga mampu menyeimbangkan perekonomian yang sedak porak poranda. Kedua, tentu mengurangi jumlah pengangguran yang meningkat selama covid akibat maraknya PHK.

Pemikiran Rasional Dalam Memutuskan Kebijakan Terkait PMI di Masa Pandemi

Pada proses pembuatan kebijakan tentu akan diawali dengan tahap formulasi kebijakan sebelum akhirnya kebijakan tersebut disetujui. Hal tersebut dimaknai dengan pemetakan atau melihat suatu kondisi di waktu tertentu untuk kemudian ditarik garis permasalahan dan di petakan sesuai urutan prioritas untuk diselesaikan. Tahap ini menuntut para pembuat kebijakan untuk mampu menganalisis secara mendetail permasalahan yang sedang terjadi. Seperti pada permasalahan yang sedang diteliti dalam tulisan ini, yakni dikeluarkannya kebijakan pemberangkatan PMI di masa pandemi. Apabila melihat situasi dan kondisi yang sedang menimpa hampir seluruh belahan dunia, tentunya kebijakan tersebut sangat tidak masuk akal mengingat beberapa peraturan yang telah mengatur tentang jaminan hak keselamatan para PMI.

Namun disisi lain tentu ada beberapa hal yang di nilai memiliki dampak positif dari kebijakan yang telah dikeluarkan.

Perlu diingat pemerintah sempat melakukan pelarangan pengiriman PMI ke negara-negara penempatan akibat kasus covid-19, namun pada pertengahan tahun 2020 aturan tersebut berubah dengan memperbolehkan pengiriman ke beberapa negara penempatan yang telah dibuka. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan pernyataan bahwa pengiriman dilakukan ke negara tujuan yang melaporkan kasus covid-19 (antaranews.com, 2020). Adanya laporan yang dilakukan oleh negara penempatan tentunya tidak dapat menjamin keamanan 100% bagi para calon PMI mengingat kondisi masih belum kondusif. Meskipun demikian pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim bahwa dari pemerintah telah siap untuk melakukan pemberangkatan kembali dengan memastikan regulasi serta kebijakan baik dari negara penerima maupun pengirim telah aman (Cnn Indonesia, 2020).

Menurut seorang ahli yakni Dunn (2003) dalam karyanya menegaskan bahwa tahap formulasi merupakan suatu hal yang penting untuk memilah alternatif penyelesaian bagi permasalahan sebelum suatu kebijakan diputuskan. Beberapa perlu diperhatikan ketika tahap formulasi tersebut dijalankan, dalam buku Taufiqurohman (2014) sedikitnya terdapat tiga hal penting yang harus terpenuhi pada tahap ini.

Pertama, persepsi bahwa fenomena tertentu benar-benar merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi. Melihat dari kasus yang sedang diteliti, persepsi yang dibangun ialah terkait isu lambannya laju perekonomian saat pandemi sehingga membuat beberapa kalangan pemerintah terfokus pada permasalahan tersebut. Klaim tersebut berdasarkan atas bukti terciptanya keterlambatan pada sistem perekonomian Indonesia mengakibatkan berbagai permasalahan lain. Kemudian ini menjadi sangat penting untuk segera diatasi dengan memberlakukan sebuah kebijakan baru guna mengendalikan permasalahan tersebut. Klaim lain yang menjadi pendukung ialah terlihat dari sikap pemerintah Indonesia masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat peduli dan terfokus pada upaya perbaikan perekonomian sejak sebelum pandemi, ini secara jelas disampaikan oleh Presiden pada saat pidato politik terkait rencana pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan memfokuskan pada empat hal yang mampu mengangkat perekonomian. Keempat hal tersebut ialah mendorong perluasan investasi, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, pembangunan infrastruktur akan terus berjalan, menciptakan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM dengan DPR, adanya sebuah penciptaan transformasi ekonomi (KPPIP, 2019).

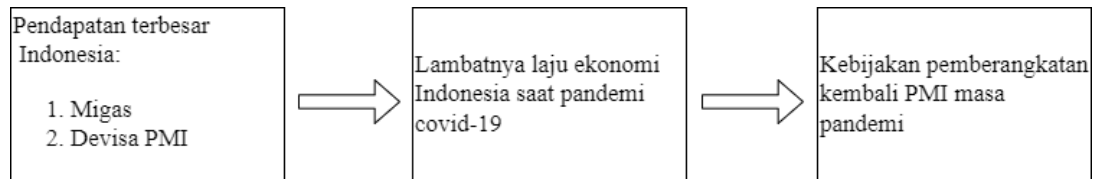
Kedua, batasan permasalahan ini sangat penting bagi para aktor pembuat kebijakan. Utamanya terkait isu yang diangkat, dalam kasus ini pembuat kebijakan akan membatasi permasalahan hanya pada sektor ekonomi domestik agar tidak terjadi keterlambatan dalam peningkatan laju ekonomi nasional. Fokus tersebut berangkat dari persepsi yang telah dibangun, serta klaim yang dapat dijadikan bukti ialah adanya

pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa di Tahun 2022 diharapkan mampu menjadi momentum untuk akselerasi pemulihan ekonomi dengan melakukan pengawasan terhadap stabilitas perekonomian dan sistem keuangan mengingat pandemi masih terus berlanjut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Ketiga, mencari dukungan agar permasalahan yang diangkat dapat masuk dalam agenda pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan agenda rapat dengan beberapa sektor terkait permasalahan yang diangkat, serta meyakinkan agar masalah tersebut dapat segera untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pihak B2PMI mendapatkan jawaban keputusan untuk kembali mengirimkan tenaga kerja merupakan suatu bentuk kesepakatan beberapa lembaga terkait, meskipun demikian pada tahun 2020 dari sektor kementerian kesehatan tidak menyetujui hal tersebut dengan alasan keselamatan para PMI. Namun dengan berbagai pertimbangan utamanya dalam hal kebutuhan ekonomi serta pekerjaan bagi sebagian masyarakat akhirnya menyetujui dengan syarat-syarat tertentu bagi para calon pekerja.

Guna memperjelas bagaimana sikap rasional seorang aktor dapat memberikan pengaruh pada saat pembuatan kebijakan berlangsung, dibawah ini disajikan skema alur berdasarkan hasil analisis.

Skema 3.3.1
Skema Alur Pengaruh *Rational Actor* Terhadap
Proses Formulasi Kebijakan



Mengacu pada skema 3.3.1 menunjukkan adanya korelasi antara gaya berpikir secara rasional dengan pengambilan sebuah keputusan. Dapat dilihat terdapat 2 pilihan yang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia dari hasil penerimaan negara bukan pajak, pertama dari sektor minyak dan gas sebagai penyumbang terbesar pertama bagi pendapatan negara. Namun selama pandemi dan melemahnya daya konsumsi mempengaruhi nilai pemasukan dari sektor migas mengalami penurunan, tahun 2020 pemerintah melakukan revisi terhadap jumlah penerimaan dari sektor migas yakni sebesar 192,04 turun menjadi 100,16 triliun (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2020). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan migas tahun 2020 diprediksi akan suram, dikarenakan tahun 2020 APBN harga minyak mentah digambarkan sebesar US\$ 63/barel akan tetapi yang terjadi ialah *Indonesian Crude Price (ICP)* jatuh dari asumsi APBN yang dirancang. Harga migas di ICP menukik sebesar 40% atau sekitar US\$ 34,23/barel yang berarti mengalami

penurunan hingga US\$ 22,38/barel (Widyastuti & Nugroho, 2020). Disamping itu jumlah penerimaan dari sektor minyak telah mengalami penurunan sebelum pandemi yakni pada tahun 2018-2019, selama kurun waktu 2018-2020 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk minyak bumi turun menjadi 51,7% dan PNBP untuk gas bumi menjadi 65,6% (CNBC Indonesia, 2021).

Pada sektor lain penyumbang pemasukan terbesar bersumber dari hasil remitansi PMI yang telah dijelaskan pada sub bab 3.2, ini masih memiliki potensi dikarenakan pada saat pandemi PMI yang berada di negara penempatan masih mampu menyumbangkan remitansi yang cukup besar. Dalam skema, permasalahan yang timbul dan perlu untuk segera diatasi ialah melambatnya laju perekonomian saat masa pandemi, dan ini merupakan persepsi yang dibangun dengan klaim yang jelaskan sebelumnya. Jika mengacu pada pengertian bagaimana *rational actor* bertindak maka pilihan penyelesaian masalah akan jatuh pada melakukan pembukaan kembali jalur keberangkatan PMI dengan harapan remitansi yang dihasilkan akan meningkatkan dan mampu mengatasi masalah perekonomian disaat pandemi serta mengurangi jumlah pengangguran. Jika ditinjau secara rasional maka sumber devisa PMI lebih besar keuntungannya daripada mengandalkan sektor migas, mengapa demikian dikarenakan daya beli masyarakat serta permintaan masih melemah sehingga dari sektor migas juga akan terdampak mengalami penurunan, sementara dari sektor PMI terjadi peningkatan permintaan pemberangkatan dari para masyarakat terdampak PHK. Sehingga terbentuklah suatu kebijakan pemberangkatan kembali PMI di masa pandemi dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru.

Fakta lain yang didapat dari hasil kegiatan wawancara tersebut ialah, pihak BP2MI memberikan pernyataan yang membenarkan keberangkatan PMI tersebut dilakukan agar membantu mengangkat kelesuan ekonomi yang sedang terjadi. Pihaknya memberikan jawaban bahwa keberangkatan PMI ini memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung bagi perekonomian Indonesia utamanya saat masa sulit pandemi covid. Dampak langsung yang dimaksud ialah dengan adanya penerimaan devisa dari para PMI yang kemudian dapat diputar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi negara, sedangkan dampak tidak langsung ialah dengan perputaran uang yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan hasil bagaimana suatu persepsi berhasil dibangun oleh para aktor pembuat kebijakan yang kemudian masuk dalam agenda pemerintah. Pola pikir secara rasional juga memberikan pengaruh yang besar atas terbentuknya kebijakan pemberangkatan kembali. Berfikir secara rasional tentu akan menimbulkan tumpang tindih dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya, ini dikarenakan aturan atau kebijakan dibuat memerlukan kecepatan dan efisiensi untuk segera diputuskan dalam waktu yang mendesak.

Adanya pemikiran tersebut dapat membuktikan bahwa sikap rasional seseorang dapat berpengaruh besar bagi pengambilan kebijakan. Hasilnya kebijakan yang

disepakati akan dapat melanggar beberapa aturan sebelumnya, seperti aturan yang membahas terkait perlindungan PMI. Hanya dengan anggapan bergantung pada devisa PMI mampu mengangkat perekonomian nasional, membuat beberapa aktor di dalamnya melupakan peraturan sebelumnya yang telah ada untuk perlindungan para PMI. Berikut beberapa peraturan yang dirasa dikesampingkan dalam peremusan kebijakan pemberangkatan kembali PMI di masa pandemi.

Aktor pembuat kebijakan yang terlibat, telah memetakan beberapa alternatif sebelumnya hingga dipilih yang dianggap paling mampu mengatasi sebuah permasalahan. Namun dengan adanya tumpang tindih peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, ini mampu memperkuat bahwa tindakan pemberangkatan kembali PMI di masa pandemi ini sebuah kebijakan yang diputuskan atas dasar perilaku rasional aktor. Kebijakan yang berdasarkan pada sebuah keuntungan yang dirasa lebih besar hasilnya dan mampu mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Hasil yang dimaksudkan ialah dengan tetap memberangkatkan PMI tentunya akan mampu mengangakat kembali pendapatan devisa negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun terdapat juga resiko bagi para PMI dikarenakan kondisi pandemi yang masih belum berakhir dan terus mengalami mutasi varian jenis virus corona.

KESIMPULAN

Berkenaan dengan analisis yang telah dilakukan menggunakan teori *rational actor* dan formulasi kebijakan, maka dapat menjawab dari rumusan masalah penelitian yang disajikan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan laju perekonomian di masa pandemi, sehingga membuat pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengatasinya. Dari hasil analisis yang dilakukan, ditemukan adanya pengaruh dari sikap rasional aktor pembuat kebijakan saat penyusunan agenda kebijakan dilakukan, ditinjau dari dua sektor pendapatan terbesar Indonesia dari PNBPN yakni migas dan devisa PMI, alternatif yang dirasa paling menguntungkan ialah dari sektor devisa PMI dikarenakan sektor migas telah mengalami penurunan 1 tahun sebelum pandemi berlangsung.

Menjawab rumusan masalah tentang alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pemberangkatan kembali PMI di masa pandemi dilakukan guna membantu memulihkan laju perekonomian nasional yang mengalami keterlambatan akibat pandemi. Hasil tersebut dapat mendukung argumen penelitian, yang mana mengindikasikan adanya pemikiran secara rasional yang hanya mengacu pada keuntungan materiil.

Kebijakan yang diambil tentu telah diperhitungkan tingkat konsekuensi yang perlu untuk diatasi, pemerintah juga melakukan serangkaian pemantauan guna menjamin hak kebutuhan hidup dasar para pekerja migran yang telah atau sudah berada

di negara penempatan. penempatan pekerja migran yang dilakukan juga berdasarkan atas permintaan dari negara penerima yang telah lama mejalin kerja sama dengan Indonesia sebagai negara penyalur.

Pemberangkatan kembali PMI masa pandemi memiliki sisi positif lainnya yaitu dapat mengurangi jumlah pengangguran yang meningkat akibat adanya gelombang PHK pada tahun 2020 , sehingga angka pengangguran dapat kembali ditekan seperti pada tahun sebelum 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama dan kedua yaitu Ibu Dr. Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si. dan Bapak Marten Hanura S.I.P., M.P.S yang telah membimbing selama penulisan skripsi. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga jurnal ini dapat diterbitkan.

REFERENSI

antaranews.com. (2020b). Pemerintah tidak melarang pengiriman TKI ke negara dengan kasus corona. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/1296830/pemerintah-tidak-melarang-pengiriman-tki-ke-negara-dengan-kasus-corona>

BBC News Indonesia. (2020). Resesi ekonomi Indonesia: Pemerintah disarankan fokus “menangani pandemi” demi perbaikan ekonomi. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>

CNBC Indonesia. (2021). Setoran Sektor Migas ke Negara Terus Anjlok Dalam 3 Tahun. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210421091149-4-239458/setoran-sektor-migas-ke-negara-terus-anjlok-dalam-3-tahun>

Cnn Indonesia. (2020a). Alasan Menaker Buka Pengiriman TKI ke Luar Lagi saat Corona. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200730151109-92-530698/alasan-menaker-buka-pengiriman-tki-ke-luar-lagi-saat-corona>

Detik.com. (2020). Larangan Mudik 2020 Berlaku untuk Daerah PSBB,Ini Daftarnya. <https://news.detik.com/berita/d-4989468/larangan-mudik-2020-berlaku-untuk-daerah-psbb-ini-daftarnya>.

Jawa Pos. (2020). Setelah 1998, RI Terpeleset ke Jurang Resesi Akibat Pandemi Covid-19. Jawapos.Com.
<https://www.jawapos.com/ekonomi/31/12/2020/setelah-1998-ri-terpeleset-ke-jurang-resesi-akibat-pandemi-covid-19/>

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. (2020). Target Penerimaan Migas Tahun 2020 Direvisi Jadi Rp 100,16 Triliun. Migas.Esdm.Go.Id.
<https://migas.esdm.go.id/post/read/target-penerimaan-migas-tahun-2020-direvisi-jadi-rp-100-16-triliun>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi, Namun Tetap Waspada Terhadap Pandemi Covid. Kemenkeu.Go.Id.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-upayakan-pemulihan-ekonomi-namun-tetap-waspada-terhadap-pandemi-covid/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Presiden: Tahun 2022 Momentum Kuat Akselerasi Pemulihan Ekonomi. Kemenkeu.Go.Id.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-tahun-2022-momentum-kuat-akselerasi-pemulihan-ekonomi/>

Kementerian Perhubungan. (2021). PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN INTERNASIONAL DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19). Retrieved from <http://jdih.dephub.go.id/> website:
http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/SE/2021/SE_5_TAHUN_2021.pdf

Kompas.com. (2021a). Pandemi Covid-19, Jumlah Pengangguran di Indonesia Naik 9,7 Juta Orang. Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-jumlah-pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang>

Kompas.com. (2021b). Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas. Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all#page2>

kontan.co.id. (2021). Pemerintah perlu melakukan hal ini agar devisa dari TKI naik lagi. Kontan.Co.Id. [https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-perlu-melakukan-hal-ini-agar-devisa-dari-tki-naik-lagi#:~:text=Data Bank Indonesia \(BI\) menunjukkan,4 miliar pada tahun 2020](https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-perlu-melakukan-hal-ini-agar-devisa-dari-tki-naik-lagi#:~:text=Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan,4 miliar pada tahun 2020)

- KPPIP. (2019). LIMA FOKUS KERJA DI PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN JOKOWI. Kppip.Go.Id. <https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/>
- Kurniawati, D. (2020). Pengiriman TKI ke Luar Negeri Dibuka Kembali. Retrieved from news.ddtc.co.id website: https://news.ddtc.co.id/pengiriman-tki-ke-luar-negeri-dibuka-kembali-22777?page_y=0
- Liputan 6. (2021). Kemnaker: 72.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>
- T. Hayes, M. (2020). Incrementalism. Retrieved from britannica.com website: <https://www.britannica.com/topic/incrementalism>
- Tristiawati, P. (2020). Pandemi Corona, Indonesia Tunda Keberangkatan 34 Ribu TKI ke Luar Negeri. Retrieved from liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/news/read/4298463/pandemi-corona-indonesia-tunda-keberangkatan-34-ribu-tki-ke-luar-negeri>
- Widyastuti, N. L., & Nugroho, H. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 166–176. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.116>